

BAB II

SEJARAH KAZAKHSTAN TERKAIT MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN RUSIA

Bab ini membahas awal mula terjalinnya hubungan Kazakhstan dengan Amerika Serikat dan Rusia, dengan fokus pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya hubungan kerjasama Kazakhstan dengan Amerika Serikat dan Rusia. Analisis akan mencakup aspek historis dan politik yang melatarbelakangi terjalinnya hubungan Kazakhstan dengan Amerika Serikat dan Rusia. Selain itu, bab ini juga akan membahas peran Kazakhstan terhadap perekonomian Amerika Serikat dan Rusia.

2.1 Hubungan Kazakhstan dengan Amerika Serikat

Hubungan diplomatik antara Kazakhstan dan Amerika Serikat secara resmi dimulai pada 25 Desember 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Kazakhstan, menandai awal hubungan bilateral yang kemudian berkembang secara signifikan dalam tiga dekade berikutnya (Weitz, 2021). Pada Februari 1992, Amerika Serikat membuka kedutaan besarnya di Almaty, yang saat itu masih menjadi ibukota Kazakhstan. Tidak lama setelah itu, pada Mei 1992, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Amerika Serikat, memulai serangkaian dialog tingkat tinggi antara kedua negara (Weitz, 2021).

Salah satu pondasi penting dalam hubungan bilateral ini adalah Program “Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction” yang dimulai pada Desember 1993. Program ini memberikan bantuan teknis dan finansial kepada Kazakhstan untuk melucuti dan mengamankan senjata nuklir warisan Soviet yang berada di wilayahnya. Upaya ini mencapai puncaknya pada tahun 1995 ketika Kazakhstan resmi menjadi negara bebas nuklir setelah memindahkan semua hulu ledak nuklirnya ke Rusia, sebuah langkah yang sangat diapresiasi oleh komunitas internasional termasuk Amerika Serikat (Starr,2006).

Pada tahun 1997, kedua negara membentuk Komisi Energi AS-Kazakhstan yang menjadi dasar bagi kerjasama ekonomi, terutama di sektor energi. Hasilnya pada tahun 1999, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai melakukan investasi besar di sektor minyak dan gas Kazakhstan, memperkuat ikatan ekonomi kedua negara. Pasca serangan 11 September 2001, hubungan keamanan antara kedua negara semakin erat ketika Kazakhstan memberikan dukungan untuk operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan, termasuk izin lintas wilayah udara dan logistik lainnya (Starr,2006). Tahun 2006 menandai dimulainya Strategic Partnership Dialogue yang memformalkan konsultasi reguler antara kedua negara mengenai berbagai isu bilateral dan global. Kemudian pada tahun 2010, Kazakhstan berpartisipasi dalam Nuclear Security Summit yang diselenggarakan Amerika Serikat, menegaskan komitmen bersama terhadap keamanan nuklir global (Starr,2006). Hubungan bilateral terus mengalami penguatan dengan ditandatanganinya Enhanced Strategic Partnership Dialogue pada tahun 2015, yang memperluas cakupan kerjasama kedua negara.

Pada tahun 2018, kedua negara menyepakati Enhanced Strategic Partnership yang semakin memperluas kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, dan tata kelola. Hingga tahun 2022, dialog tingkat tinggi terus berlanjut dengan fokus pada kerja sama ekonomi, keamanan regional, dan respons terhadap pandemi COVID-19. Hubungan Kazakhstan-Amerika Serikat saat ini mencakup berbagai aspek penting seperti kerja sama keamanan dan non-proliferasi, investasi ekonomi terutama di sektor energi, pendidikan dan pertukaran budaya, serta kerja sama regional di Asia Tengah (Collins, 2003).

2.1.1 Relasi Diplomatik

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Kazakhstan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada 25 Desember 1991 (U.S. Department of State, 2023). Sejak saat itu, hubungan bilateral Kazakhstan-Amerika Serikat telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup berbagai bidang kerja sama. Pada masa awal kemerdekaan Kazakhstan, Amerika Serikat memberikan dukungan signifikan dalam proses denuklirisasi negara tersebut. Melalui Program Pengurangan Ancaman Kooperatif (Cooperative Threat Reduction Program) yang diinisiasi oleh Senator Sam Nunn dan Richard Lugar, Amerika Serikat membantu Kazakhstan menonaktifkan dan memindahkan senjata nuklir warisan Soviet dari wilayahnya (Kassenova, 2016).

Kerja sama ini memperkuat fondasi hubungan bilateral yang kemudian berkembang ke berbagai sektor. Hubungan ekonomi menjadi pilar penting dalam relasi kedua negara. Amerika Serikat telah menjadi salah satu investor terbesar di Kazakhstan, dengan fokus utama pada sektor energi. Perusahaan-perusahaan Amerika seperti Chevron dan ExxonMobil telah berinvestasi miliaran dolar dalam pengembangan ladang minyak Tengiz dan Kashagan (Hanks, 2019). Nilai investasi langsung Amerika Serikat di Kazakhstan mencapai lebih dari \$45 miliar pada periode 1993-2022, dengan peningkatan perdagangan bilateral yang mencapai \$2,5 miliar pada tahun 2022 (Bureau of South and Central Asian Affairs, 2023). Dalam konteks keamanan regional, Kazakhstan dan Amerika Serikat telah menjalin kerja sama yang erat setelah peristiwa 9/11. Kazakhstan memberikan dukungan kepada operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan dengan mengizinkan penggunaan ruang udaranya dan menyediakan bantuan kemanusiaan (Weitz, 2018). Kedua negara juga berpartisipasi dalam latihan militer bersama dalam kerangka NATO Partnership for Peace, serta menjalin kerja sama dalam penanggulangan terorisme, perdagangan narkoba, dan penanganan kejahatan transnasional (Collins & Bekenova, 2017).

Di bidang politik, dialog tingkat tinggi antara kedua negara berlangsung secara reguler. Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev mengunjungi Washington beberapa kali, termasuk kunjungan resmi pada tahun 2018 yang menghasilkan pengumuman Kemitraan Strategis yang Ditingkatkan (Enhanced Strategic Partnership) antara kedua negara (White House, 2018). Demikian pula, pejabat tinggi Amerika

Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri, secara berkala mengunjungi Kazakhstan untuk memperkuat hubungan bilateral.

Kazakhstan menjalankan politik luar negeri multi-vektor yang menyeimbangkan hubungannya dengan berbagai kekuatan global, termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, hubungan Kazakhstan dengan Amerika Serikat tetap menjadi komponen penting dalam strategi kebijakan luar negerinya, terutama dalam mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan keamanannya (Anceschi, 2020). Amerika Serikat juga mendukung keanggotaan Kazakhstan dalam organisasi internasional seperti WTO, yang difinalisasi pada tahun 2015 setelah proses negosiasi panjang (WTO, 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, fokus kerja sama bilateral telah diperluas ke bidang pendidikan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Program pertukaran pendidikan seperti Fulbright dan USAID memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kazakhstan (USAID, 2022). Amerika Serikat juga mendukung inisiatif Kazakhstan untuk menjadi hub energi hijau regional melalui transfer teknologi dan investasi dalam energi terbarukan (U.S. Embassy in Kazakhstan, 2023). Tantangan dalam relasi bilateral termasuk kekhawatiran Amerika Serikat terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, dan korupsi di Kazakhstan. Laporan Departemen Luar Negeri AS secara rutin mencatat adanya keterbatasan kebebasan politik, media, dan masyarakat sipil di Kazakhstan (U.S. Department of State, 2022).

Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap memandang Kazakhstan sebagai mitra penting di kawasan Asia Tengah, khususnya dalam menyeimbangkan pengaruh Rusia dan China di wilayah tersebut (Stronski, 2021).

Transisi kepemimpinan di Kazakhstan setelah pengunduran diri Presiden Nazarbayev pada tahun 2019 dan kerusuhan politik pada Januari 2022 telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan bilateral. Amerika Serikat menyatakan dukungan untuk proses reformasi politik yang diumumkan oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev, meskipun tetap memantau implementasinya dengan saksama (U.S. Embassy in Kazakhstan, 2022). Secara keseluruhan, relasi diplomatik Kazakhstan-Amerika Serikat menunjukkan perkembangan positif selama tiga dekade terakhir, ditandai dengan kerja sama yang semakin mendalam dan beragam. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan perbedaan pandangan dalam beberapa isu, kedua negara terus membangun fondasi kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional di Asia Tengah (Cornell & Starr, 2019).

2.1.2 Kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan

Kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan telah menjadi fondasi utama dalam hubungan bilateral kedua negara sejak Kazakhstan merdeka pada tahun 1991. Kazakhstan memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, uranium, dan berbagai mineral berharga lainnya yang menarik perhatian Amerika Serikat dari perspektif strategis maupun ekonomi (Olcott,

2015). Minyak dan gas alam merupakan sumber daya yang paling signifikan dalam hubungan ekonomi Amerika Serikat-Kazakhstan. Kazakhstan memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 30 miliar barel, yang menempatkannya di peringkat ke-12 dunia, dan memiliki ladang minyak Kashagan yang merupakan salah satu penemuan terbesar dalam 40 tahun terakhir (U.S. Energy Information Administration, 2022). Perusahaan-perusahaan minyak Amerika seperti Chevron dan ExxonMobil telah menjadi investor asing terbesar di sektor energi Kazakhstan, dengan investasi Chevron di proyek Tengizchevroil mencapai lebih dari \$37 miliar sejak tahun 1993 (Chevron Kazakhstan, 2023).

Kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak Kazakhstan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga geopolitik. Dengan mendukung pengembangan infrastruktur energi Kazakhstan, Amerika Serikat berupaya membantu Kazakhstan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pipa Rusia untuk ekspor energinya. Dukungan terhadap Pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) yang menghubungkan Laut Kaspia dengan pasar Mediterania merupakan contoh nyata dari strategi ini (Socor, 2018). Diversifikasi rute ekspor tidak hanya menguntungkan Kazakhstan tetapi juga sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat dalam mendiversifikasi pasokan energi global dan mengurangi dominasi Rusia di pasar energi Eurasia (Kalicki, 2015). Selain minyak dan gas, Amerika Serikat memiliki kepentingan signifikan terhadap uranium Kazakhstan. Kazakhstan adalah produsen uranium terbesar di dunia, menyumbang sekitar 43% dari produksi global pada tahun 2022 (World Nuclear Association, 2023). Perusahaan

energi nuklir Amerika telah mengembangkan kerja sama dengan Kazatomprom, perusahaan uranium nasional Kazakhstan. Pada tahun 2017, Westinghouse Electric Company menandatangani kesepakatan dengan Kazatomprom untuk memperluas produksi bahan bakar nuklir (World Nuclear News, 2017). Akses terhadap uranium Kazakhstan mendukung industri tenaga nuklir Amerika Serikat dan menciptakan alternatif terhadap ketergantungan pada sumber uranium dari negara-negara seperti Rusia.

Logam tanah jarang (rare earth elements) dan mineral kritis lainnya juga menjadi fokus kepentingan Amerika Serikat di Kazakhstan. Dalam konteks persaingan teknologi dengan China, yang saat ini mendominasi pasar logam tanah jarang global, Amerika Serikat berupaya mendiversifikasi rantai pasokannya melalui kerja sama dengan Kazakhstan (Medeiros, 2021). Mineral-mineral ini sangat penting untuk produksi peralatan militer canggih, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Pada tahun 2019, Amerika Serikat dan Kazakhstan menandatangani memorandum kerja sama untuk pengembangan sektor pertambangan mineral kritis, yang menunjukkan pentingnya isu ini dalam hubungan bilateral (U.S. Department of Commerce, 2019). Kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan juga mencakup dimensi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun mendukung pengembangan sektor hidrokarbon, Amerika Serikat juga berinvestasi dalam proyek energi terbarukan di Kazakhstan. USAID telah meluncurkan program Power the Future

yang bertujuan membantu Kazakhstan dalam transisi energi dan mencapai target emisi karbon netral pada tahun 2060 (USAID, 2022).

Inisiatif tersebut mencerminkan pendekatan seimbang Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan, yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek maupun keberlanjutan jangka panjang. Dalam mengembangkan akses terhadap sumber daya Kazakhstan, Amerika Serikat menghadapi persaingan dari China dan Rusia. Inisiatif Belt and Road China telah meningkatkan investasi China di sektor energi dan mineral Kazakhstan (Laruelle, 2018). Sementara itu, Rusia mempertahankan pengaruh historisnya melalui jaringan pipa dan integrasi ekonomi regional (Weitz, 2020). Untuk menghadapi persaingan ini, Amerika Serikat telah mengembangkan strategi C5+1, sebuah format dialog regional yang mencakup lima negara Asia Tengah dan Amerika Serikat, yang di antaranya membahas kerja sama dalam bidang energi dan sumber daya (U.S. Department of State, 2020). Dari perspektif Kazakhstan, diversifikasi investor internasional dalam sektor sumber daya merupakan prioritas strategis. Kebijakan multi-vektor Kazakhstan bertujuan menyeimbangkan keterlibatan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, dalam pengembangan sumber dayanya (Anceschi, 2020). Pendekatan ini memberikan Kazakhstan fleksibilitas dalam negosiasi dan mengurangi ketergantungan pada satu investor asing. Amerika Serikat, sebagai investor utama, memperoleh manfaat dari pendekatan ini melalui kesempatan investasi yang relatif terbuka dibandingkan dengan beberapa negara kaya sumber daya lainnya (Starr & Cornell, 2018).

Kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya juga mencakup aspek-aspek teknis dan pengembangan kapasitas. USAID dan institusi pemerintah Amerika lainnya telah memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola di sektor ekstraktif Kazakhstan (USAID, 2021). Dukungan Amerika Serikat untuk keanggotaan Kazakhstan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya Kazakhstan mengikuti standar internasional dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kazakhstan (EITI, 2020). Tantangan dalam kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan termasuk ketidakstabilan harga komoditas global, keterbatasan infrastruktur, dan komplikasi geopolitik regional. Fluktuasi harga minyak, seperti yang terjadi pada tahun 2014-2016 dan 2020, memengaruhi kelayakan ekonomi dari proyek-proyek besar (Kazenergy, 2021). Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur transportasi yang melewati wilayah negara lain menambah kompleksitas dalam pengembangan sumber daya Kazakhstan (Dadabaev, 2019).

Secara keseluruhan, kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya Kazakhstan merepresentasikan kombinasi dari motif ekonomi, geopolitik, dan strategis yang telah membentuk hubungan bilateral selama tiga dekade terakhir. Melalui investasi dan keterlibatan dalam sektor energi dan mineral, Amerika Serikat berupaya memastikan akses terhadap sumber daya penting, mempromosikan stabilitas regional, dan mengimbangi pengaruh kekuatan kompetitor di Asia Tengah (Cooley, 2022). Bagi Kazakhstan, kerja sama dengan Amerika Serikat menawarkan akses terhadap

teknologi, modal, dan pasar yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi nasional (Rumer et al., 2016).

2.2 Hubungan Kazakhstan dengan Rusia

Hubungan antara Kazakhstan dan Rusia memiliki akar sejarah yang panjang, bermula pada abad ke-18 ketika Kekaisaran Rusia mulai melakukan ekspansi ke wilayah stepa Kazakhstan (Olcott, 1995). Proses integrasi berlangsung secara bertahap, dimulai dengan penerimaan perlindungan Rusia oleh beberapa khanate Kazakhstan antara tahun 1731-1742, hingga akhirnya pada 1860-an seluruh wilayah Kazakhstan telah menjadi bagian dari kekuasaan Rusia. Setelah Revolusi 1917, Kazakhstan diintegrasikan ke dalam struktur Uni Soviet, mula-mula sebagai Republik Otonom Soviet Sosialis Kirghiz yang kemudian berganti nama menjadi Kazakhstan, dan pada 1936 statusnya ditingkatkan menjadi Republik Soviet Sosialis Kazakhstan. Selama era Soviet, Kazakhstan mengalami kebijakan Russifikasi intensif dan menjadi lokasi penting untuk uji coba nuklir Soviet di Semipalatinsk (Cummings, 2005).

Babak baru dalam hubungan kedua negara dimulai ketika Kazakhstan menyatakan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991 menyusul keruntuhan Uni Soviet. Hubungan diplomatik resmi antara Kazakhstan merdeka dan Federasi Rusia dibentuk pada 25 Desember 1991, dan diperkuat melalui Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal Balik yang ditandatangani pada Mei 1992 (Mantel, 2019). Momen penting dalam hubungan bilateral terjadi pada 1994 ketika Kazakhstan menyerahkan senjata nuklir warisan Soviet ke Rusia. Di era kontemporer,

kedua negara mempertahankan hubungan strategis melalui keanggotaan dalam organisasi regional bersama seperti CIS, CSTO, dan SCO. Secara geografis, kedua negara berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia sekitar 7.644 km, dan secara ekonomi Rusia tetap menjadi mitra dagang utama Kazakhstan. Hubungan antariksa juga signifikan, dengan Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan disewa oleh Rusia hingga tahun 2050 (Anceschi, 2010).

2.2.1 Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik antara Kazakhstan dan Rusia merupakan salah satu relasi bilateral paling penting bagi Kazakhstan, yang memiliki akar historis yang kuat dan kompleks. Kedua negara berbagi perbatasan darat sepanjang lebih dari 7.500 kilometer, yang merupakan perbatasan darat terpanjang kedua di dunia (Olcott, 2022). Hubungan ini dibentuk oleh warisan sejarah panjang dari masa Kekaisaran Rusia hingga era Soviet, yang meninggalkan pengaruh mendalam pada berbagai aspek kehidupan di Kazakhstan. Setelah Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada Desember 1991, Rusia dengan cepat mengakui status kedaulatannya, dan hubungan diplomatik resmi dibentuk pada 22 Oktober 1992 (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, 2023). Di bawah kepemimpinan Presiden Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan menjalin hubungan yang erat dengan Rusia, meskipun secara simultan mengembangkan politik luar negeri multi-vektor yang berupaya menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan global (Anceschi, 2020).

Kerja sama ekonomi merupakan pilar utama dalam hubungan Kazakhstan-Rusia. Rusia telah konsisten menjadi salah satu mitra dagang terbesar Kazakhstan, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai \$24,2 miliar pada tahun 2021 (Committee on Statistics of Kazakhstan, 2022). Struktur perdagangan antara kedua negara mencerminkan komplementaritas ekonomi mereka, dengan Kazakhstan mengeksport bahan baku dan produk pertanian ke Rusia, sementara mengimpor mesin, peralatan, dan produk manufaktur (Eurasian Economic Commission, 2023). Integrasi ekonomi regional juga menjadi aspek penting dalam hubungan bilateral. Kazakhstan merupakan anggota pendiri Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) bersama dengan Rusia dan Belarus pada tahun 2015, yang bertujuan menciptakan pasar bebas regional dan harmonisasi kebijakan ekonomi (Vinokurov, 2018). Melalui EAEU, Kazakhstan mendapatkan akses preferensial ke pasar Rusia yang besar, meskipun pada saat yang sama menghadapi tantangan berupa dominasi ekonomi Rusia dalam blok tersebut (Dragneva & Wolczuk, 2017).

Dalam dimensi keamanan, Kazakhstan dan Rusia memiliki kerja sama yang erat melalui Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Kazakhstan berpartisipasi dalam latihan militer bersama dan mengandalkan Rusia untuk pasokan peralatan militer dan pelatihan personel (Kurmashev & Akhmedyanova, 2019). Keterikatan keamanan ini menjadi sangat nyata pada Januari 2022, ketika Kazakhstan meminta bantuan CSTO untuk mengatasi kerusuhan dalam negeri, dan Rusia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan (International Crisis Group,

2022). Kerja sama energi merupakan komponen strategis lain dalam hubungan bilateral. Kazakhstan mengandalkan infrastruktur pipa Rusia untuk mengekspor sebagian besar minyak dan gasnya ke pasar internasional (Palazuelos & Fernández, 2020). Konsorsium Pipa Kaspia (CPC), yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Rusia, merupakan rute ekspor minyak utama dari ladang Tengiz Kazakhstan menuju pelabuhan Rusia di Laut Hitam (Socor, 2019). Meskipun Kazakhstan berupaya mendiversifikasi rute ekspornya, ketergantungan pada infrastruktur Rusia tetap signifikan.

Aspek sosial-budaya juga menjadi dimensi penting dalam hubungan Kazakhstan-Rusia. Kazakhstan memiliki populasi etnis Rusia yang signifikan, sekitar 18% dari total penduduknya (Committee on Statistics of Kazakhstan, 2023). Bahasa Rusia masih digunakan secara luas di Kazakhstan dan memiliki status resmi sebagai "bahasa antar-etnis" menurut konstitusi Kazakhstan (Sullivan, 2019). Faktor-faktor ini menciptakan ikatan sosial dan budaya yang kuat antara kedua negara. Meskipun demikian, hubungan Kazakhstan-Rusia tidak terlepas dari tantangan. Sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, Kazakhstan telah menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi implikasi bagi integritas teritorialnya sendiri, mengingat adanya populasi etnis Rusia yang signifikan di wilayah utara Kazakhstan (Diener, 2018). Kazakhstan secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional (Kassenova, 2017).

Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 menciptakan tantangan diplomatik yang signifikan bagi Kazakhstan. Negara ini mengambil posisi hati-hati dengan tidak mendukung agresi Rusia terhadap Ukraina, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow (Satpayev, 2022). Kazakhstan berupaya menyeimbangkan kewajibannya sebagai sekutu Rusia dengan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan keinginan untuk mempertahankan hubungan baik dengan Barat (Umarov, 2022). Di bawah kepemimpinan Presiden Kassym-Jomart Tokayev yang menggantikan Nazarbayev pada tahun 2019, Kazakhstan telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran halus dalam kebijakan luar negerinya, termasuk upaya untuk menegaskan kembali otonominya dalam hubungan dengan Rusia (Laruelle et al., 2021). Tokayev telah secara publik menyatakan bahwa Kazakhstan tidak akan mengakui wilayah separatis yang didukung Rusia di Ukraina dan menekankan komitmen Kazakhstan terhadap Piagam PBB (Reuters, 2022).

Kerja sama di sektor nuklir merupakan area penting lainnya dalam hubungan bilateral. Sebagai negara yang mewarisi senjata nuklir Soviet, Kazakhstan bekerja sama dengan Rusia dalam denuklirisasi wilayahnya selama tahun 1990-an (Aben, 2019). Saat ini, kerja sama nuklir berfokus pada pengembangan energi nuklir sipil, dengan Rusia sebagai mitra potensial dalam rencana Kazakhstan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (World Nuclear Association, 2022). Hubungan ekonomi Kazakhstan-Rusia juga mencakup kerja sama ruang angkasa, dengan

Kosmodrom Baikonur di wilayah Kazakhstan yang disewa oleh Rusia hingga tahun 2050 (Zhukov & Baizakova, 2020).

Kompleks peluncuran antariksa ini memiliki nilai strategis dan historis yang signifikan bagi program ruang angkasa Rusia, sementara Kazakhstan memperoleh manfaat ekonomi dari perjanjian sewa dan transfer teknologi terkait (Lele, 2018). Perkembangan signifikan dalam hubungan Kazakhstan-Rusia juga termasuk upaya bersama dalam mengatasi tantangan regional, seperti manajemen sumber daya air, migrasi, dan ancaman keamanan non-tradisional (Sorbello, 2020). Kedua negara berpartisipasi dalam berbagai format multilateral regional, termasuk Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan Komunitas Negara-negara Merdeka (CIS), yang menyediakan platform tambahan untuk koordinasi kebijakan (Kassen, 2018). Secara keseluruhan, hubungan diplomatik Kazakhstan dengan Rusia ditandai oleh kemitraan strategis yang kompleks dan multidimensi, yang didasarkan pada interdependensi ekonomi, ikatan historis dan budaya, serta kepentingan keamanan bersama. Meskipun Kazakhstan terus menjalankan politik luar negeri multi-vektor dan berupaya memperluas otonominya, hubungannya dengan Rusia tetap menjadi prioritas strategis dalam kebijakan luar negerinya (Kuchins et al., 2020). Ke depan, evolusi hubungan ini akan terus dipengaruhi oleh dinamika geopolitik regional, perkembangan ekonomi di kedua negara, serta keseimbangan yang dicari Kazakhstan antara mempertahankan aliansi historisnya dengan Rusia dan membangun hubungan yang lebih beragam dengan kekuatan global lainnya (Cooley & Roberts, 2023).

2.2.2 Relasi Identitas

Relasi identitas antara Kazakhstan dan Rusia merupakan aspek yang kompleks dan multidimensi, dibentuk oleh warisan sejarah panjang dan interaksi yang intensif selama berabad-abad. Hubungan ini melibatkan perpaduan antara identitas etnis, budaya, bahasa, dan konsepsi diri nasional yang terus berevolusi sejak Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 (Cummings, 2012).

Sejarah panjang pengaruh Rusia di wilayah Kazakhstan dimulai pada abad ke-18 ketika Kekaisaran Rusia secara bertahap memperluas kontrolnya ke wilayah steppe Kazakhstan. Proses kolonisasi ini menghasilkan perubahan demografis signifikan dengan masuknya pemukiman etnis Rusia ke wilayah utara Kazakhstan dan introduksi sistem administratif Rusia (Olcott, 2016). Selama era Soviet (1922-1991), proses Rusifikasi semakin intensif melalui kebijakan migrasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, dan kampanye modernisasi yang secara fundamental mengubah komposisi demografis dan struktur sosial Kazakhstan (Cameron, 2018).

Pada masa pasca-Soviet, pembentukan identitas nasional Kazakhstan menjadi prioritas utama bagi kepemimpinan negara tersebut. Presiden Nursultan Nazarbayev memperkenalkan konsep "Kazakhstan multietnis" yang mengakui keberagaman etnis negara tersebut sambil menekankan persatuan nasional dan harmoni antar-etnis (Isaacs, 2018). Pendekatan ini mencerminkan realitas demografis Kazakhstan, di mana etnis Kazakh merupakan mayoritas (sekitar 69%), tetapi juga memiliki populasi etnis Rusia

yang signifikan (sekitar 18%) dan lebih dari 100 kelompok etnis lainnya (Committee on Statistics of Kazakhstan, 2023).

Dimensi bahasa menjadi aspek penting dalam relasi identitas Kazakhstan-Rusia. Meskipun bahasa Kazakh ditetapkan sebagai bahasa nasional dalam konstitusi Kazakhstan, bahasa Rusia memiliki status resmi sebagai "bahasa komunikasi antar-etnis" dan digunakan secara luas dalam administrasi publik, bisnis, dan pendidikan tinggi (Smagulova, 2020). Kebijakan bilingual ini mencerminkan pragmatisme politik untuk mengakomodasi populasi berbahasa Rusia yang signifikan, namun juga menciptakan tantangan dalam upaya revitalisasi bahasa Kazakh (Fierman, 2019).

Program "Kazakifikasi" yang diimplementasikan sejak kemerdekaan mencakup berbagai inisiatif untuk mempromosikan bahasa Kazakh, memulihkan toponimi asli Kazakh untuk kota dan wilayah geografis, serta merevisi narasi sejarah yang berpusat pada pengalaman dan perspektif Kazakh (Burkhanov & Sharipova, 2020). Proses ini telah menghasilkan pergeseran bertahap dalam keseimbangan linguistik dan budaya, meskipun bahasa Rusia tetap dominan di perkotaan dan sektor ekonomi formal (Aitymbetov et al., 2021).

Relasi identitas ini juga berdimensi spasial yang penting. Wilayah utara Kazakhstan, yang berbatasan langsung dengan Rusia, memiliki konsentrasi populasi etnis Rusia yang tinggi dan menunjukkan tingkat integrasi budaya dan linguistik yang lebih besar dengan Rusia (Diener, 2018). Perbedaan regional ini menciptakan tantangan dalam pembentukan identitas nasional yang kohesif dan mempengaruhi diskursus politik domestic Kazakhstan (Laruelle, 2019).

Dalam konteks historis, interpretasi periode Soviet dan kolonial Rusia menjadi arena kontestasi identitas yang signifikan. Narasi resmi Kazakhstan mencoba mengambil jalan tengah dengan mengakui aspek-aspek positif dan negatif dari periode tersebut. Di satu sisi, ada pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Kazakh selama kampanye kolektivisasi Soviet yang menyebabkan kelaparan massal pada tahun 1930-an (Cameron, 2021). Di sisi lain, modernisasi infrastruktur dan pembangunan ekonomi selama era Soviet juga diakui sebagai kontribusi positif terhadap perkembangan Kazakhstan (Kudaibergenova, 2017).

Media dan produksi budaya menjadi arena penting dalam pembentukan dan negosiasi identitas. Media berbahasa Rusia tetap memiliki pengaruh yang signifikan di Kazakhstan, dengan siaran televisi, film, dan konten online dari Rusia yang mudah diakses dan populer (Laruelle & Royce, 2021). Pada saat yang sama, pemerintah Kazakhstan berinvestasi dalam produksi konten media dalam bahasa Kazakh dan mempromosikan narasi budaya yang memperkuat identitas nasional Kazakh (Burkhanov, 2020).

Internet dan media sosial telah menciptakan ruang baru untuk ekspresi dan kontestasi identitas. Komunitas online berbahasa Kazakh yang dinamis telah berkembang dalam dekade terakhir, membentuk apa yang disebut sebagai "Kaznet" (Shklovski & Struthers, 2018). Platform digital ini memfasilitasi diskusi tentang isu-isu identitas, sejarah, dan budaya di kalangan generasi muda Kazakhstan, yang sering kali memiliki orientasi identitas yang berbeda dari generasi sebelumnya (Dubuisson, 2019).

Kebijakan bahasa telah menjadi isu sensitif dalam relasi identitas Kazakhstan-Rusia. Transisi dari alfabet Sirilik ke alfabet Latin untuk bahasa Kazakh, yang diumumkan pada tahun 2017 dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2025, dipandang sebagai langkah simbolis untuk mengurangi pengaruh Rusia dan mendekatkan Kazakhstan dengan dunia Turki dan Barat (Aitymbetov, 2022). Keputusan ini menuai kritik dari kelompok berbahasa Rusia dan menciptakan perdebatan tentang implikasi politik dan praktisnya (Kuzembayeva et al., 2018).

Diaspora Kazakh di Rusia (sekitar 650.000 orang) dan diaspora Rusia di Kazakhstan (sekitar 3,5 juta orang) menjadi mediator penting dalam pertukaran budaya antar kedua negara (Sadovskaya, 2020). Komunitas transnasional ini memelihara jaringan sosial, ekonomi, dan budaya yang menjembatani kedua negara dan mempengaruhi dinamika identitas di kedua sisi perbatasan (Laruelle, 2019).

Kebijakan pendidikan juga merefleksikan kompleksitas relasi identitas ini. Reformasi kurikulum sejarah pasca-Soviet di Kazakhstan berupaya menyeimbangkan antara narasi nasionalis Kazakh dengan pengakuan terhadap kontribusi berbagai kelompok etnis dalam perkembangan negara (Kissane, 2019). Sekolah-sekolah di Kazakhstan mengoperasikan program dalam bahasa Kazakh dan Rusia, mencerminkan realitas bilingual masyarakatnya (Smagulova & Zharkynbekova, 2021).

Persepsi ancaman terhadap identitas nasional sering muncul dalam diskursus publik di Kazakhstan, terutama terkait dengan pernyataan oknum politisi Rusia yang mempertanyakan legitimasi historis perbatasan Kazakhstan atau status wilayah utara yang didominasi etnis Rusia (Diener, 2018). Pernyataan-pernyataan semacam ini,

meskipun tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah Rusia, memicu kekhawatiran di Kazakhstan dan mendorong pemerintah untuk memperkuat narasi identitas nasionalnya (Laruelle, 2018).

Di level masyarakat, evolusi identitas post-Soviet menghasilkan pola identifikasi yang kompleks. Penelitian etnografis menunjukkan bahwa banyak penduduk Kazakhstan, terutama di daerah perkotaan dan wilayah utara, mengembangkan identitas hibrid yang mengintegrasikan elemen Kazakh, Rusia, dan Soviet (Kesici, 2018). Identitas regional "Eurasianisme" juga menjadi kerangka alternatif yang menekankan karakter unik Kazakhstan sebagai jembatan antara Eropa dan Asia, antara tradisi Rusia dan Kazakh (Laruelle, 2019).

Generasi muda Kazakhstan menunjukkan transformasi signifikan dalam orientasi identitas mereka. Berbeda dengan generasi yang lebih tua yang dibesarkan pada era Soviet, kaum muda yang lahir setelah kemerdekaan cenderung memiliki identifikasi yang lebih kuat dengan Kazakhstan sebagai negara merdeka dan lebih terbuka terhadap pengaruh global di luar Rusia (Sharipova et al., 2020). Fenomena ini menciptakan kesenjangan generasi dalam hal preferensi linguistik, konsumsi budaya, dan orientasi geopolitik (Koch, 2019).

Kebijakan "Ruhani Zhangyru" (Modernisasi Spiritual) yang diluncurkan oleh Presiden Nazarbayev pada tahun 2017 mencerminkan upaya komprehensif untuk memperkuat identitas nasional Kazakhstan dengan cara yang tidak konfrontatif terhadap warisan Soviet dan hubungan dengan Rusia (Kudaibergenova, 2020). Program ini berfokus pada revitalisasi warisan budaya Kazakh sambil tetap terbuka

terhadap modernisasi dan globalisasi, mencerminkan keseimbangan rumit yang dicari Kazakhstan dalam mengelola identitas nasionalnya dalam konteks hubungan historis dengan Rusia (Burkhanov & Sharipova, 2022).

Secara keseluruhan, relasi identitas Kazakhstan dengan Rusia terus menjadi proses negosiasi yang dinamis yang melibatkan berbagai tingkatan dari kebijakan negara hingga praktik sehari-hari warga. Kazakhstan berusaha menavigasi jalan tengah yang mengakui warisan sejarah bersama dengan Rusia sambil secara bertahap memperkuat elemen-elemen unik identitas nasionalnya (Omelicheva, 2021). Pendekatan ini mencerminkan realitas geopolitik, demografis, dan budaya yang kompleks yang dihadapi Kazakhstan sebagai negara pasca-Soviet yang berbatasan langsung dengan bekas pusat imperial (Laruelle & Peyrouse, 2022).

2.2.3 Kepentingan Rusia terhadap ras tertentu Kazakhstan

Hubungan Rusia dengan berbagai kelompok etnis di Kazakhstan memiliki dimensi historis, politik, dan strategis yang kompleks yang telah berkembang selama periode kolonial, Soviet, dan pasca-Soviet (Dave, 2016).

Perhatian Rusia terhadap populasi etnis Rusia di Kazakhstan merupakan aspek yang paling menonjol dalam dinamika ini. Etnis Rusia merupakan kelompok minoritas terbesar di Kazakhstan, berjumlah sekitar 3,5 juta orang atau 18% dari total populasi, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Federasi Rusia (Committee on Statistics of Kazakhstan, 2023). Sejak runtuhnya Uni Soviet, perlindungan terhadap warga etnis Rusia di "luar negeri dekat" (near abroad)

telah menjadi komponen penting dalam kebijakan luar negeri Rusia, termasuk di Kazakhstan (Laruelle, 2018).

Doktrin kebijakan luar negeri Rusia secara eksplisit menyebutkan perlindungan hak-hak dan kepentingan warga negara Rusia dan "orang-orang Rusia" (соотечественники/sootchestvenniki) di luar negeri sebagai prioritas nasional (Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2016). Konsep "orang-orang Rusia" ini didefinisikan secara luas mencakup bukan hanya warga negara Rusia yang tinggal di luar negeri, tetapi juga etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia yang mungkin merupakan warga negara dari negara-negara pasca-Soviet (Grigas, 2018).

Di Kazakhstan, kebijakan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk dukungan Rusia terhadap komunitas etnis Rusia, termasuk program budaya, beasiswa pendidikan, dan dukungan untuk organisasi masyarakat berbahasa Rusia (Laruelle, 2019). Russkiy Mir Foundation, yang didirikan oleh dekrit presiden Rusia pada tahun 2007, telah membuka beberapa pusat di Kazakhstan untuk mempromosikan bahasa dan budaya Rusia, yang secara tidak langsung memperkuat identitas Rusia di kalangan penduduk berbahasa Rusia di Kazakhstan (Suslov, 2020).

Dalam diskursus politik domestik Rusia, narasi tentang "perlindungan" minoritas etnis Rusia di Kazakhstan kadang-kadang digunakan untuk tujuan mobilisasi politik. Politisi nasionalis Rusia seperti Vladimir Zhirinovskiy (almarhum) telah membuat pernyataan kontroversial yang mempertanyakan integritas teritorial Kazakhstan, khususnya terkait wilayah utara dengan populasi etnis Rusia yang signifikan (Diener, 2018). Meskipun tidak mewakili kebijakan resmi Kremlin, retorika

semacam ini menciptakan kekhawatiran di Kazakhstan dan mempengaruhi dinamika hubungan bilateral (Kassen, 2018).

Kepentingan Rusia terhadap etnis Rusia di Kazakhstan juga memiliki dimensi geopolitik. Keberadaan komunitas etnis Rusia yang besar memberikan Rusia pengaruh politik dan budaya yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen "soft power" dan potensi pengungkit dalam hubungan bilateral (Laruelle, 2017). Namun, pemerintah Rusia juga berhati-hati untuk tidak secara terbuka mengintervensi masalah internal Kazakhstan atau melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai destabilisasi, karena Kazakhstan merupakan sekutu yang penting bagi Rusia di kawasan Asia Tengah (Roberts, 2019).

Emigrasi etnis Rusia dari Kazakhstan ke Rusia juga menjadi perhatian kedua negara. Sejak kemerdekaan Kazakhstan, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah etnis Rusia di Kazakhstan, dari sekitar 37% populasi pada tahun 1989 menjadi sekitar 18% saat ini (Zardykhan, 2018). Untuk mengatasi tren ini dan mempertahankan pengaruh demografinya, Rusia telah meluncurkan program repatriasi yang dikenal sebagai "Program Pemukiman Kembali Соотечественники" yang menawarkan kewarganegaraan dan insentif ekonomi bagi etnis Rusia dari negara-negara bekas Soviet, termasuk Kazakhstan, yang ingin pindah ke Rusia (Schenk, 2020).

Selain etnis Rusia, Rusia juga menunjukkan kepentingan terhadap kelompok etnis lain di Kazakhstan yang memiliki ikatan historis, linguistik, atau budaya dengan Rusia. Termasuk etnis Ukraina, Belarus, Tatar, Jerman, Korea, dan Polandia yang merupakan bagian dari mosaik multietnis Kazakhstan akibat kebijakan relokasi dan

migrasi masa Soviet (Fierman, 2019). Komunitas-komunitas ini sering berbahasa Rusia dan berorientasi budaya Rusia, memperluas lingkup pengaruh "dunia Rusia" di Kazakhstan (Peyrouse, 2017).

Media berbahasa Rusia memainkan peran penting dalam menjaga pengaruh kultural Rusia di Kazakhstan. Stasiun televisi, portal berita, dan platform media sosial Rusia memiliki audiens yang besar di Kazakhstan, tidak hanya di antara etnis Rusia tetapi juga di kalangan etnis Kazakh perkotaan yang fasih berbahasa Rusia (Roberts, 2020). Melalui pengaruh media ini, narasi Rusia tentang isu-isu regional dan global tersebar luas di Kazakhstan, membentuk opini publik dan persepsi tentang Rusia dan hubungan Kazakhstan-Rusia (Tussupova, 2018).

Kepentingan Rusia terhadap dimensi etnolinguistik di Kazakhstan juga terwujud dalam kerangka kerja sama regional seperti Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Dalam forum-forum ini, Rusia mempromosikan visi integrasi Eurasia yang sebagian didasarkan pada warisan Soviet bersama dan penggunaan bahasa Rusia sebagai *lingua franca* regional (Kudaibergenova, 2020). Melalui pendekatan ini, Rusia berupaya mempertahankan dan memperkuat ikatan etnolinguistik dengan populasi berbahasa Rusia di Kazakhstan, sambil mempromosikan kepentingan geopolitik dan ekonominya di kawasan tersebut (Laruelle, 2018).

Kebijakan bahasa di Kazakhstan telah menjadi isu sensitif dalam hubungannya dengan Rusia. Upaya Kazakhstan untuk mempromosikan penggunaan bahasa Kazakh dan mengurangi dominasi bahasa Rusia dalam administrasi publik dan pendidikan

sering mendapat tanggapan negatif dari media dan politisi Rusia (Smagulova, 2020). Keputusan Kazakhstan untuk beralih dari alfabet Sirilik ke alfabet Latin untuk bahasa Kazakh, yang akan sepenuhnya diimplementasikan pada tahun 2025, dipandang oleh beberapa pengamat Rusia sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari pengaruh Rusia secara kultural dan geopolitik (Marat, 2021).

Dalam bidang pendidikan, Rusia telah mendirikan beberapa cabang universitas Rusia di Kazakhstan dan menawarkan kuota beasiswa khusus untuk mahasiswa Kazakhstan (terutama dari latar belakang etnis Rusia) untuk belajar di Rusia (Omelicheva, 2020). Inisiatif tidak hanya memperkuat ikatan akademik tetapi juga mempertahankan orientasi budaya Rusia di kalangan generasi muda Kazakhstan dan potensial menciptakan jaringan elit pro-Rusia (Laruelle, 2019).

Peran gereja Ortodoks Rusia juga signifikan dalam konteks ini. Sebagai institusi yang secara historis terkait erat dengan identitas Rusia, gereja Ortodoks memiliki kehadiran yang kuat di Kazakhstan dan berperan dalam mempertahankan identitas kultural Rusia di kalangan penduduk etnis Rusia dan Slavia lainnya (Knox, 2018). Hierarki gereja di Kazakhstan tetap berada di bawah Patriarkat Moskow, menciptakan jalur pengaruh kultural dan religius dari Rusia ke komunitas Ortodoks di Kazakhstan (Laruelle & Peyrouse, 2019).

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan Rusia terhadap komunitas etnis di Kazakhstan juga harus dipahami dalam konteks hubungan bilateral yang lebih luas. Kazakhstan merupakan mitra strategis Rusia di Asia Tengah, dan Rusia memiliki kepentingan yang lebih besar dalam mempertahankan stabilitas Kazakhstan dan

menjaga hubungan baik dengan pemerintahan di Nur-Sultan (sekarang Astana) daripada memancing ketegangan etnis (Cooley, 2021). Oleh karena itu, meskipun secara retorik kadang-kadang menggunakan narasi tentang perlindungan etnis Rusia, dalam praktiknya Rusia cenderung menghindari tindakan yang dapat secara serius mengancam kedaulatan Kazakhstan atau stabilitas regionalnya (Roberts & Moshes, 2020).

Respons Kazakhstan terhadap kepentingan Rusia ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Di bawah kepemimpinan Presiden Nursultan Nazarbayev (1991-2019), Kazakhstan menerapkan pendekatan pragmatis dengan memberikan status resmi kepada bahasa Rusia sebagai "bahasa komunikasi antar-etnis" dan mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, sambil secara bertahap mempromosikan identitas nasional Kazakhstan (Isaacs, 2019). Di bawah Presiden Kassym-Jomart Tokayev, terdapat indikasi pergeseran halus ke arah penegasan kedaulatan yang lebih kuat vis-à-vis Rusia, meskipun tetap mempertahankan hubungan strategis (Sullivan, 2021).

Secara keseluruhan, kepentingan Rusia terhadap kelompok etnis tertentu di Kazakhstan mencerminkan strategi multidimensi untuk mempertahankan pengaruh budaya, linguistik, dan geopolitik di bekas wilayah Soviet. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen "soft power" melalui promosi budaya dan bahasa, hubungan dengan diaspora etnis Rusia, serta integrasi ekonomi dan keamanan regional (Laruelle, 2022). Bagi Kazakhstan, menavigasi dinamika ini tetap menjadi tantangan penting dalam mempertahankan keseimbangan antara hubungan historis dengan Rusia

dan pembangunan identitas nasional yang independen dalam konteks politik luar negeri multi-vektornya (Anceschi, 2022).

2.3 Dinamika Politik Luar Negeri Kazakhstan

Politik luar negeri Kazakhstan telah mengalami evolusi yang signifikan sejak negara ini memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada Desember 1991. Di bawah kepemimpinan Presiden pertama Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan memformulasikan dan mengimplementasikan pendekatan "multi-vektor" sebagai prinsip dasar kebijakan luar negerinya, yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan global dan regional tanpa menjadi terlalu bergantung pada satu negara atau blok (Anceschi, 2020). Pendekatan pragmatis ini muncul sebagai respons terhadap realitas geopolitik yang dihadapi Kazakhstan sebagai negara daratan terbesar kesembilan di dunia yang berbatasan dengan dua kekuatan besar Rusia dan China serta kebutuhan untuk menarik investasi asing dan membangun ekonomi nasional pasca-Soviet (Hanks, 2015).

Relasi dengan Rusia telah menjadi dimensi penting dalam politik luar negeri Kazakhstan, didorong oleh faktor-faktor historis, geografis, ekonomi, dan keamanan. Kazakhstan berpartisipasi aktif dalam organisasi-organisasi regional yang dipimpin Rusia seperti Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang mencerminkan kepentingan strategisnya dalam mempertahankan hubungan yang erat dengan tetangga utaranya (Vinokurov, 2018). Pada saat yang sama, Kazakhstan telah mengembangkan kerangka kerja sama bilateral

yang komprehensif dengan China, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur, serta berpartisipasi dalam inisiatif Belt and Road China sebagai komponen penting dari strategi konektivitas ekonominya (Laruelle, 2018).

Di front barat, Kazakhstan secara konsisten berupaya mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dipandang sebagai sumber penting investasi, teknologi, dan keseimbangan geopolitik. Program Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA) dengan Uni Eropa yang ditandatangani pada tahun 2015 dan dialog bilateral reguler dengan Amerika Serikat melalui format C5+1 (lima negara Asia Tengah plus Amerika Serikat) mencerminkan dimensi barat dari pendekatan multi-vektor Kazakhstan (Cornell & Starr, 2019). Kazakhstan juga mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan NATO melalui kerangka Partnership for Peace, yang melibatkan latihan militer bersama dan kerja sama dalam bidang keamanan non-tradisional (McDermott, 2017).

Diplomasi regional merupakan komponen integral dari kebijakan luar negeri Kazakhstan. Di kawasan Asia Tengah, Kazakhstan telah memposisikan dirinya sebagai kekuatan stabilisasi dan mediator, mempromosikan integrasi ekonomi regional dan mekanisme kerja sama untuk mengatasi tantangan bersama seperti manajemen sumber daya air, keamanan perbatasan, dan ekstremisme kekerasan (Kassen, 2018). Transformasi gradual hubungan regional di Asia Tengah selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah transisi kepemimpinan di Uzbekistan pada tahun 2016, telah menciptakan dinamika baru yang dimanfaatkan oleh Kazakhstan untuk memperdalam

integrasi ekonomi dan meningkatkan kerja sama keamanan regional (Abdurasulov, 2021).

Kazakhstan juga mengejar politik luar negeri aktif di luar lingkungan terdekatnya, dengan mengembangkan hubungan strategis dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Hubungan dengan Turki memiliki dimensi khusus yang didasarkan pada ikatan etno-linguistik dan kultural, sementara kerja sama ekonomi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan India terus diperkuat sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi Kazakhstan (Koch, 2020). Pendekatan ini mencerminkan ambisi Kazakhstan untuk memposisikan dirinya sebagai "jembatan" antara Eropa dan Asia, dan antara berbagai peradaban dan blok ekonomi global (Anceschi, 2019).

Multilateralisme merupakan pilar penting lainnya dalam politik luar negeri Kazakhstan. Sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kazakhstan mencapai tonggak signifikan dengan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2017-2018 yang pertama untuk negara Asia Tengah dan menggunakan platform ini untuk mempromosikan prioritas regionalnya serta isu-isu global seperti non-proliferasi nuklir dan keamanan pangan (Weitz, 2018). Kazakhstan juga telah menunjukkan kepemimpinan dalam forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Konferensi Interaksi dan Langkah-langkah Membangun Kepercayaan di Asia (CICA), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang mencerminkan pendekatan inklusifnya terhadap kerja sama internasional (Baizakova, 2017).

Non-proliferasi nuklir menjadi tema utama dalam diplomasi Kazakhstan, yang berakar pada pengalaman historisnya sebagai lokasi uji coba nuklir Soviet dan keputusan awal untuk melepaskan arsenal nuklir warisan Soviet yang pada saat itu merupakan keempat terbesar di dunia. Inisiatif Kazakhstan seperti pendirian Bank Bahan Bakar Nuklir IAEA di Oskemen pada tahun 2017 dan advokasi konsisten untuk dunia bebas senjata nuklir telah memperkuat kredibilitasnya sebagai pemimpin global dalam agenda non-proliferasi dan pelucutan senjata (Aben, 2019).

Dalam konteks ekonomi politik internasional, Kazakhstan telah berupaya untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem ekonomi global. Akses ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2015 setelah proses negosiasi panjang hampir dua dekade menandai pencapaian penting dalam strategi ini (Anceschi, 2018). Kazakhstan juga secara aktif mempromosikan dirinya sebagai destinasi investasi yang menarik melalui inisiatif seperti Astana International Financial Centre dan program privatisasi strategis yang bertujuan menarik modal dan keahlian asing ke sektor-sektor kunci ekonominya (Sullivan, 2019).

Transisi kepemimpinan dari Presiden Nazarbayev ke Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada tahun 2019 menandai fase baru dalam evolusi politik luar negeri Kazakhstan. Meskipun mempertahankan komitmen terhadap prinsip multi-vektor, administrasi Tokayev telah menunjukkan beberapa pergeseran nuansa dalam implementasinya, termasuk penegasan yang lebih kuat terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Kazakhstan dalam hubungannya dengan mitra-mitra regionalnya (Kuzmenko, 2021). Hal tersebut lihat jelas dalam respons diplomatik Kazakhstan

terhadap konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2022, di mana Kazakhstan berupaya menjaga posisi netral yang hati-hati dengan tidak mendukung tindakan Rusia sambil tetap menjaga hubungan ekonomi dan keamanan yang vital dengan Moskow (Umarov, 2022).

Kerusuhan sosial-politik yang melanda Kazakhstan pada Januari 2022, yang mengakibatkan intervensi pasukan penjaga perdamaian CSTO yang dipimpin Rusia, juga memiliki implikasi signifikan bagi politik luar negeri negara tersebut. Peristiwa ini menggarisbawahi keseimbangan rumit yang dihadapi Kazakhstan dalam menjaga otonominya di tengah ketergantungan keamanan pada Rusia, serta menyoroti kebutuhan untuk memperdalam reformasi internal dan meningkatkan legitimasi internasionalnya (International Crisis Group, 2022).

Kebijakan luar negeri Kazakhstan juga dipengaruhi oleh dinamika internal, termasuk transisi ekonomi dari model berbasis sumber daya ke ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan. Inisiatif seperti "Kazakhstan-2050" dan kemudian "Green Kazakhstan" mencerminkan upaya untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan prioritas pembangunan domestik, termasuk diversifikasi ekonomi, modernisasi teknologi, dan mitigasi perubahan iklim (Koch, 2021). Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan ekonomi dalam kebijakan luar negeri kontemporer Kazakhstan (Kassen, 2022).

Secara keseluruhan, dinamika politik luar negeri Kazakhstan ditandai oleh pendekatan pragmatis dan adaptif yang berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan dan kekuatan eksternal sambil memajukan prioritas pembangunan

nasional. Meskipun menghadapi tantangan dari lingkungan regional yang kompleks dan kadang tidak stabil, Kazakhstan telah berhasil membangun profil internasional yang berbeda sebagai aktor regional yang signifikan dan mediator diplomatik yang konstruktif. Ke depan, evolusi politik luar negeri Kazakhstan kemungkinan akan terus ditentukan oleh interaksi antara imperatif geopolitik regionalnya, aspirasi untuk integrasi global yang lebih dalam, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar yang bersaing untuk pengaruh di kawasan strategis Asia Tengah (Cooley, 2022).